

Problematika Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Antara Idealisme dan Realitas Pembelajaran

Arisma Salwa Hilmana^{1*}, Muhammad Aqua Mutharik²

^{1,2} Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Universitas Jambi, Indonesia

Email: arismasalwa02@gmail.com

*Penulis korespondensi : arismasalwa02@gmail.com

Abstract: *The Independent Curriculum aims to provide flexible, student-centered learning that is oriented toward strengthening character through the Pancasila Student Profile. However, a literature review indicates that its implementation in elementary schools still faces various obstacles. Teachers' understanding of differentiated learning, the P5 project, and authentic assessment is uneven, while limited infrastructure and the complexity of developing teaching materials also hamper its implementation. Furthermore, student readiness and a supportive learning environment also influence the curriculum's effectiveness. These findings emphasize the need to improve teacher competency, ensure equitable distribution of facilities, and collaborate among stakeholders for optimal implementation of the Independent Curriculum. Furthermore, the disparity in the quality of implementation across schools is also a major challenge, particularly in remote areas with limited facilities. Therefore, supportive policies and intensive mentoring for teachers are needed to ensure that this curriculum is effective and provides maximum benefits for students, optimizing character development and 21st-century skills. Overall, the success of the Independent Curriculum depends heavily on solid collaboration between all relevant parties, including teachers, schools, parents, and education policymakers.*

Keywords: Implementation, Merdeka Curriculum, P5 Project, Pancasila Student Profile, Primary Education.

Abstrak: Kurikulum Merdeka bertujuan memberikan pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Namun, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasinya di Sekolah Dasar masih menghadapi berbagai kendala. Pemahaman guru mengenai pembelajaran berdiferensiasi, proyek P5, dan asesmen autentik belum merata, sementara keterbatasan sarana prasarana serta kompleksitas penyusunan perangkat ajar turut menghambat pelaksanaannya. Selain itu, kesiapan peserta didik dan dukungan lingkungan belajar juga berpengaruh terhadap efektivitas kurikulum. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi guru, pemerataan fasilitas, dan kolaborasi antar-stakeholder agar Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara optimal. Selain itu, adanya ketimpangan kualitas implementasi di berbagai sekolah juga menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil dengan fasilitas terbatas. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung serta pendampingan intensif bagi guru perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik, mengoptimalkan perkembangan karakter dan keterampilan abad ke-21. Secara keseluruhan, keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara semua pihak terkait, termasuk guru, sekolah, orang tua, dan pemangku kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi, Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila, Proyek P5, Sekolah Dasar.

1. PENDAHULUAN

Kurikulum Merdeka hadir sebagai bentuk pembaruan kurikulum yang menekankan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan diferensiasi pembelajaran untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik di Sekolah Dasar. Dalam idealismenya, kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk merancang perangkat ajar, menentukan metode, serta mengembangkan asesmen yang sesuai dengan karakteristik siswa (Aditomo & Satriawan, 2022). Konsep ini sejalan dengan paradigma pembelajaran berbasis kompetensi yang berfokus pada proses dan perkembangan siswa, bukan sekadar pencapaian materi (Direktorat Sekolah

Dasar, 2022). Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), Kurikulum Merdeka diharapkan mampu membentuk siswa yang kreatif, kolaboratif, serta berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila (Puspita, 2023).

Berbagai problematika muncul dalam penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran berdiferensiasi masih belum merata, sehingga penerapannya sering tidak optimal. Tantangan ini diperberat oleh kebutuhan waktu yang lebih banyak untuk memetakan profil belajar siswa dan merancang kegiatan pembelajaran yang beragam dalam satu kelas (Latifah & Widyastuti, 2023). Pelaksanaan proyek P5 juga menghadapi kendala karena membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan perencanaan matang, sedangkan banyak sekolah belum memiliki tim pelaksana atau fasilitas penunjang yang memadai (Puspita, 2023). Di sisi lain, dukungan orang tua yang beragam turut mempengaruhi keberhasilan implementasi, terutama karena sebagian orang tua belum memahami konsep pembelajaran berbasis proyek dan fleksibilitas kurikulum (Rahmawati, 2022). Situasi tersebut memperjelas adanya kesenjangan antara rancangan kurikulum yang bersifat ideal dengan kondisi nyata di sekolah yang menghadapi tantangan sumber daya maupun pemahaman.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis. Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan intensif menjadi langkah utama yang perlu dilakukan (Aditomo & Satriawan, 2022). Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan perangkat ajar dan modul pembelajaran yang komprehensif sebagai acuan guru (Kemdikbudristek, 2022). Selain itu, peningkatan sarana prasarana sekolah perlu dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pembelajaran proyek (Direktorat Sekolah Dasar, 2022). Kolaborasi antara sekolah dan orang tua juga harus diperkuat melalui sosialisasi mengenai konsep Kurikulum Merdeka (Rahmawati, 2022). Dengan dukungan manajemen sekolah yang solid serta evaluasi rutin terhadap implementasi, Kurikulum Merdeka berpotensi diterapkan secara lebih efektif dan berkesinambungan (Latifah & Widyastuti, 2023).

2. KAJIAN TEORI

Teori Kurikulum

Menurut pemahaman tradisional, kurikulum dipandang sebagai sekumpulan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru atau dipelajari oleh siswa. Cara pandang seperti ini sudah dikenal sejak masa Yunani Kuno. Meskipun konsep kurikulum telah banyak berkembang, dalam situasi atau lingkungan tertentu pandangan lama tersebut masih tetap digunakan hingga sekarang, yaitu kurikulum sebagai “... *a racecourse of subject matters to be mastered*”. Ada pendapat mengatakan bahwa kurikulum: “*a course, as a specific fixed course*”.

of study, as in school or college, as one leading to a degree". Lebih khusus mungkin kurikulum diartikan hanya sebagai isi pelajaran (Hamdi, 2020).

Pengertian kurikulum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu pengertian tradisional, modern, dan pengertian masa kini. Dalam pandangan tradisional, kurikulum dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran yang diberikan di lembaga pendidikan. Sementara itu, menurut pandangan modern, mata pelajaran hanyalah salah satu unsur dari kurikulum. Kurikulum dilihat sebagai keseluruhan aktivitas yang dialami peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar, baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah, maupun di luar sekolah, selama kegiatan tersebut berada dalam tanggung jawab sekolah. Adapun pengertian kurikulum masa kini menekankan bahwa kurikulum merupakan sebuah sistem yang terdiri atas tujuan, materi, evaluasi, dan komponen lain yang saling berhubungan dan dirancang oleh sekolah untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan (Hamdi, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, kurikulum dapat diartikan sebagai serangkaian pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan, mencakup tujuan, isi, proses pembelajaran, dan evaluasi, serta seluruh kegiatan yang dialami peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran, tetapi sebagai suatu sistem yang terintegrasi yang mengatur arah belajar, isi pembelajaran, metode pelaksanaan, dan mekanisme penilaian untuk menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik.

Teori Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum merupakan salah satu aspek krusial dalam pengembangan pendidikan di Indonesia karena kurikulum berperan sebagai pedoman utama dalam merancang pengalaman belajar peserta didik yang relevan, adaptif, dan bermakna. Menurut Hamdi (2020) kurikulum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran atau materi pembelajaran, melainkan sebagai suatu sistem terpadu yang mencakup tujuan, isi, metode pembelajaran, dan evaluasi, yang disusun secara sistematis agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang optimal baik di dalam maupun di luar kelas. Perubahan kurikulum tidak sekadar menyentuh dokumen atau materi ajar, tetapi juga terkait proses pembelajaran, peran guru, manajemen sekolah, dan keterlibatan stakeholder pendidikan, termasuk orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan kurikulum merupakan proses dinamis yang memerlukan pemahaman teori dan strategi implementasi yang matang agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara efektif. Beberapa faktor yang mendorong perubahan kurikulum antara lain:

1. Kebutuhan peserta didik, yang meliputi karakteristik, minat, dan kemampuan belajar, sehingga kurikulum harus relevan dengan perkembangan psikologis dan akademik anak.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menuntut pembaruan materi, metode, dan media pembelajaran agar siswa mampu menghadapi tantangan abad 21.
3. Tuntutan masyarakat dan industri, agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja dan kehidupan global.
4. Kebijakan pemerintah dan regulasi pendidikan nasional, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan Kurikulum Merdeka, yang menyediakan kerangka hukum dan pedoman bagi sekolah dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum (Kemdikbudristek, 2022)

Perubahan kurikulum dapat diterapkan melalui beberapa model:

1. *Top-down*, di mana pemerintah atau lembaga pusat menentukan kurikulum dan guru bertindak sebagai pelaksana.
2. *Bottom-up (grass-root)*, yang menempatkan guru dan sekolah sebagai agen utama perubahan, karena mereka memahami karakteristik peserta didik dan konteks lokal secara lebih mendalam.
3. *Hybrid*, yaitu kombinasi *top-down* dan *bottom-up*, di mana pemerintah memberikan kerangka kurikulum, tetapi guru diberi fleksibilitas dalam menentukan metode, modul ajar, dan asesmen. Kurikulum Merdeka menggunakan model hybrid, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lokal, karakter peserta didik, dan proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) (Kemdikbudristek, 2022)

Dengan memahami teori perubahan kurikulum, analisis terhadap Kurikulum Merdeka dapat lebih komprehensif, termasuk menilai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi, serta merumuskan strategi agar perubahan kurikulum berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme kurikulum dan realitas di Sekolah Dasar.

Teori Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum adalah proses penerapan rencana kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di sekolah. Menurut Hamdi (2020), implementasi kurikulum tidak hanya melibatkan guru sebagai pengajar, tetapi juga manajemen sekolah, peserta didik, orang tua, dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum yang baik tidak akan menghasilkan pembelajaran yang efektif jika implementasinya tidak diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, teori implementasi kurikulum menekankan kesiapan guru, sarana-prasarana, pengelolaan

sekolah, dan keterlibatan stakeholder sebagai faktor kunci keberhasilan. Beberapa aspek penting dalam implementasi kurikulum antara lain:

1. Kesiapan Guru

- a) Guru harus memahami tujuan kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
- b) Kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi (Hamdi, 2020).

2. Pengelolaan Sekolah

- a) Manajemen sekolah harus mendukung guru melalui fasilitas, waktu, dan bimbingan.
- b) Koordinasi antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sangat penting untuk konsistensi implementasi kurikulum.

3. Keterlibatan Stakeholder

- a) Orang tua dan masyarakat memiliki peran dalam mendukung proses pembelajaran, baik melalui pemantauan, motivasi, maupun penyediaan sumber belajar.
- b) Dukungan stakeholder meningkatkan efektivitas implementasi dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik (Kemdikbudristek, 2022).

4. Sarana dan Prasarana

- a) Ketersediaan buku, modul, laboratorium, teknologi, dan media pembelajaran sangat menentukan kualitas implementasi.
- b) Kurikulum Merdeka menekankan penggunaan sumber belajar yang fleksibel dan kontekstual, sehingga sarana pendukung menjadi faktor penentu keberhasilan.

5. Evaluasi dan Umpan Balik

- a) Implementasi kurikulum harus disertai evaluasi berkelanjutan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai.
- b) Umpan balik dari guru, siswa, dan stakeholder lain digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan praktik pembelajaran.

Beberapa strategi untuk mendukung implementasi perubahan kurikulum meliputi:

- a) Pelatihan dan pendampingan guru secara intensif agar memahami tujuan, metode, dan asesmen Kurikulum Merdeka.
- b) Penyediaan modul ajar dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan sekolah.
- c) Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran aktif.

- d) Sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat agar seluruh stakeholder terlibat dalam proses pendidikan dan mendukung pelaksanaan kurikulum secara maksimal.

Meskipun memberikan keleluasaan, implementasi perubahan kurikulum menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Kesiapan guru, karena guru harus memahami tujuan kurikulum, menyusun perangkat ajar, dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di sekolah terpencil atau yang memiliki fasilitas terbatas, sehingga metode pembelajaran inovatif sulit diterapkan.
3. Kesenjangan antara dokumen kurikulum dan praktik di kelas, di mana guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa yang heterogen.
4. Peran serta orang tua dan masyarakat, yang memengaruhi efektivitas pembelajaran serta dukungan terhadap inovasi kurikulum.

Teori implementasi kurikulum menekankan bahwa kurikulum yang baik hanyalah *blueprint*, sedangkan keberhasilan pendidikan bergantung pada proses penerapan di lapangan. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, implementasi di Sekolah Dasar menuntut guru untuk mengintegrasikan fleksibilitas pembelajaran, proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), serta menyesuaikan metode dan asesmen sesuai karakteristik siswa dan kondisi sekolah (Kemdikbudristek, 2022).

Teori Pembelajaran Abad 21 (*21st Century Learning*)

Pembelajaran merupakan proses interaksi yang saling berkaitan antara pendidik dan peserta didik, yang pelaksanaannya berlandaskan pada kurikulum sebagai acuan utama. Proses ini bertujuan menghasilkan perubahan positif pada diri peserta didik, baik dalam ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dari kegiatan pembelajaran tersebut lahir berbagai fungsi, baik fungsi sosial maupun fungsi psikologis. Untuk mencapai tujuan itu, pembelajaran tidak dapat berlangsung secara sepihak; harus ada hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Interaksi dua arah ini dapat diwujudkan melalui penggunaan berbagai pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang tepat. (Humayra, 2025).

Pembelajaran pada abad ke-21 menuntut penggunaan teknologi sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di era milenial, sehingga peserta didik dapat terbiasa dengan berbagai kecakapan hidup yang relevan untuk masa kini. Perkembangan abad ke-21 yang selaras dengan revolusi industri 4.0 membawa dampak besar bagi dunia pendidikan. Di sekolah, proses belajar mengajar kini diarahkan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C, yaitu *Critical Thinking*, *Communication*, *Collaboration*, dan *Creativity* ini dapat terwujud cepat tidak hanya tuntutan pada kinerja guru

dalam mengubah metode mengajar, tetapi juga peran dan tanggung jawab pendidik non formal dalam membiasakan anak-anak menerapkan 4C dalam keseharian. Untuk mencapai kondisi belajar yang ideal, kualitas pengajaran selalu terkait dengan penggunaan model pembelajaran secara optimal, ini berarti bahwa untuk mencapai kualitas pengajaran yang tinggi setiap mata pelajaran harus diorganisasikan dengan model pengorganisasian yang tepat dan selanjutnya disampaikan kepada siswa dengan model yang tepat pula. Keterampilan 4C wajib dikuasai dan dimiliki oleh setiap peserta didik guna menghadapi tantangan abad 21 (Ramdani, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Studi Literatur (*Library Research*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui penelusuran database ilmiah terpercaya, kemudian dianalisis secara deskriptif dan kritis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemahaman guru sekolah dasar terhadap Kurikulum Merdeka masih berada pada tingkat yang bervariasi. Sebagian guru telah memahami konsep fundamental seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila, namun sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan konsep-konsep tersebut secara operasional di kelas. Keterbatasan pelatihan yang bersifat teknis dan berkelanjutan serta perubahan paradigma pembelajaran yang cukup signifikan dari kurikulum sebelumnya menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesiapan sebagian guru (Rahayu, Lestari, & Putra, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara konseptual Kurikulum Merdeka menuntut peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang adaptif, namun dalam realitasnya belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar (Suryani, 2023)

Selain aspek kompetensi guru, kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi faktor determinan dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan pemanfaatan teknologi digital, penggunaan media pembelajaran interaktif, serta pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa tidak seluruh satuan pendidikan dasar memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung tuntutan tersebut, terutama sekolah yang berada di wilayah tertinggal dan terluar (Hidayat & Andriani, 2022). Keterbatasan infrastruktur ini menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan

Kurikulum Merdeka, sehingga terjadi perbedaan kualitas implementasi antara sekolah yang memiliki sarana lengkap dan sekolah dengan keterbatasan fasilitas (Widodo, 2023).

Problematika lainnya yang mengemuka adalah kompleksitas penyusunan perangkat ajar dan administrasi pembelajaran. Guru dituntut untuk menyusun modul ajar, alur tujuan pembelajaran, serta melakukan asesmen diagnostik sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran. Meskipun secara normatif Kurikulum Merdeka dirancang untuk menyederhanakan administrasi guru, dalam praktiknya transisi dari format perencanaan sebelumnya masih dirasakan sebagai beban tambahan (Rachmawati, 2022). Terutama bagi guru yang memiliki keterbatasan penguasaan teknologi, proses penyusunan perangkat ajar berbasis digital menjadi tantangan tersendiri yang berdampak pada efektivitas perencanaan pembelajaran.

Pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu karakteristik utama Kurikulum Merdeka juga belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara optimal di sekolah dasar. Guru menghadapi kendala dalam melakukan pemetaan kemampuan awal peserta didik, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan karakteristik siswa, serta mengelola kelas yang heterogen dengan jumlah peserta didik yang relatif besar. Padahal, secara teoritis pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Keterbatasan waktu, tingginya beban mengajar, serta rasio guru dan peserta didik yang belum ideal menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya (Pratiwi, 2023).

Dalam aspek asesmen, Kurikulum Merdeka mengedepankan penggunaan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan belajar peserta didik. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian guru masih berorientasi pada penilaian hasil akhir dalam bentuk nilai numerik, sementara penerapan asesmen proses dan asesmen autentik belum dilaksanakan secara konsisten. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pendekatan asesmen yang dikehendaki dalam Kurikulum Merdeka dengan praktik penilaian yang masih berlangsung di sekolah dasar.

Dari perspektif peserta didik, Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan potensi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Namun demikian, tidak seluruh peserta didik mampu beradaptasi dengan tuntutan kemandirian belajar yang tinggi, khususnya pada siswa kelas rendah. Perbedaan kemampuan literasi dasar, latar belakang sosial keluarga, serta tingkat dukungan orang tua menjadi faktor yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar (Sulastri & Ramadhan, 2023).

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka secara konseptual menawarkan pembaruan dalam sistem pembelajaran yang lebih berorientasi pada peserta didik, fleksibel, dan berlandaskan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Namun, realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala struktural dan pedagogis, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, kompleksitas administrasi pembelajaran, hingga tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen autentik. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan Kurikulum Merdeka dengan realitas pembelajaran di sekolah dasar, sehingga diperlukan penguatan kebijakan pendukung, pendampingan berkelanjutan bagi guru, serta pemerataan fasilitas pendidikan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan kurikulum.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar masih menghadapi sejumlah problematika yang mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas pembelajaran di lapangan. Problematika tersebut meliputi belum meratanya pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi Kurikulum Merdeka, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, kompleksitas perangkat ajar dan administrasi pembelajaran, serta belum optimalnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen autentik. Dari sisi peserta didik, tuntutan kemandirian belajar yang tinggi juga belum sepenuhnya sejalan dengan kesiapan literasi dasar dan dukungan lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan.

Meskipun demikian, Kurikulum Merdeka secara konseptual memiliki potensi besar dalam mendorong terwujudnya pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan karakter serta kompetensi abad ke-21 melalui Profil Pelajar Pancasila. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar sangat ditentukan oleh adanya penguatan kompetensi guru secara berkelanjutan, pemerataan akses sarana dan prasarana pendidikan, serta sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kebijakan. Upaya-upaya tersebut menjadi prasyarat utama agar tujuan Kurikulum Merdeka tidak hanya berhenti pada tataran ideal normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran yang berkualitas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditomo, A., & Satriawan, R. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- Direktorat Sekolah Dasar. (2022). *Pembelajaran dengan Paradigma Baru pada Kurikulum Merdeka*. Direktorat Jenderal PAUD, Diknas, dan Dikmen.
- Hamdi, M. M. (2020). *Evaluasi Kurikulum Pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- Hidayat, R., & Andriani, S. (2022). Kesiapan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Humayra, N. S. (2025). Integrasi Teori Pembelajaran Bahasa untuk Penguatan Pembelajaran Abad ke-21 dalam Konteks Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Inovatif*. <https://doi.org/10.54082/jupin.549>
- Kemdikbudristek. (2022). *Capaian Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- Latifah, S., & Widyastuti, D. (2023). Tantangan Pembelajaran Diferensiasi di Sekolah Dasar pada Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pembelajaran*.
- Pratiwi, D. A. (2023). Problem Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan*.
- Puspita, S. (2023). *Pelaksanaan P5 di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Karakter Anak Usia Sekolah.
- Rachmawati, N. (2022). Beban Administrasi Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Rahayu, S., Lestari, P., & Putra, A. (2022). *Analisis Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Penerapan Kurikulum Merdeka*. Jurnal Ilmu Pendidikan.
- Rahmawati, I. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka: Peluang dan Tantangan bagi Guru SD. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*.
- Ramdani, N. G. (2023). Definisi dan Teori Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran. *Jurnal of Elementary Education and Teaching Innovation*. [https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2\(1\).20-31](https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2(1).20-31)
- Sulastri, S., & Ramadhan, M. (2023). Adaptasi Belajar Siswa Sekolah Dasar dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Psikologi Pendidikan*.
- Suryani, N. (2023). Peran Guru Sebagai Fasilitator dalam Pembelajaran Kurikulum Merdeka. *Jurnal Psikologi Pendidikan*.
- Widodo. (2023). Ketimpangan Kualitas Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*.